

Peranan Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Pada Kemacetan Jalan Sudirman Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

* Raihan Junndi¹, Ahmad Fitra Yuza²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : raihanjunndi@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peranan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan dalam mengatasi permasalahan kemacetan di Jalan Sudirman Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena meningkatnya volume kendaraan serta terbatasnya lahan parkir yang menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas di kawasan pusat kota. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi. Informan penelitian meliputi pejabat UPT Parkir Dinas Perhubungan, aparat kepolisian, pelaku usaha, dan masyarakat pengguna jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan UPT Parkir Dinas Perhubungan masih belum optimal dalam pengendalian parkir di Jalan Sudirman Duri. Hal ini terlihat dari lemahnya pengawasan terhadap parkir liar, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan parkir. Meskipun demikian, UPT Parkir telah melakukan beberapa upaya seperti penataan ulang titik parkir, pemberlakuan retribusi resmi, dan koordinasi dengan aparat terkait. Kesimpulannya, peran UPT Parkir perlu ditingkatkan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

Kata Kunci: UPT Parkir, kemacetan, Jalan Sudirman Duri, Dinas Perhubungan, kebijakan parkir

Abstract

This study aims to evaluate the role of the Technical Implementation Unit (UPT) of the Department of Transportation in addressing traffic congestion on Jalan Sudirman, Duri, Mandau District, Bengkalis Regency. The increasing number of vehicles and the limited availability of parking areas in this location have triggered severe congestion, particularly around the Mandau Bridge area. This research employed a qualitative descriptive approach, using interviews, field observations, and documentation. The informants consisted of UPT Parking officials, police officers, business actors, and road users. The findings reveal that the role of the UPT Parking Unit remains suboptimal, particularly in supervising and enforcing regulations against illegal parking. Respondent 2 emphasized that the main factor causing congestion is the weak supervision of on-street parking and the lack of strict enforcement of sanctions. In addition, limited infrastructure and low public awareness regarding parking regulations further exacerbate traffic conditions. Efforts carried out by the UPT Parking Unit, such as the arrangement of parking points, the implementation of official retribution, and coordination with related agencies, have not yet produced a significant impact. In conclusion, the role of the UPT Parking Unit needs to be strengthened through improved supervision quality, stricter law enforcement, and continuous public socialization to create a more orderly parking system and reduce traffic congestion.

Keywords: UPT Parking, traffic congestion, Jalan Sudirman Duri, supervision, parking policy

PENDAHULUAN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, terdapat dua jenis fasilitas parkir, yaitu parkir di badan jalan (on street parking) dan parkir di luar badan jalan (off street parking). Pada daerah yang belum memiliki kawasan parkir khusus, badan jalan dapat dimanfaatkan sebagai area parkir dengan ketentuan mengikuti peraturan yang berlaku serta tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kabupaten Bengkalis, sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan yang cukup tinggi, seharusnya menyediakan kawasan parkir khusus dan mengelola parkir di tepi jalan umum secara baik dan benar agar tidak menghambat pergerakan lalu lintas di jalan raya. Beberapa lokasi yang memerlukan penataan parkir secara serius antara lain kawasan pasar Mandau yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan, khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Kecamatan Mandau, berperan sebagai pihak yang mengelola pelaksanaan perparkiran di wilayah Duri. UPT Parkir ini beroperasi berdasarkan asas desentralisasi, di mana kewenangan yang dimilikinya merupakan bagian dari urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Peran yang sangat penting dan strategis dalam ikut mendorong dan sekaligus menggerakkan dinamika Pembangunan daerah terutama keterkaitan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat (*Public Service*), penunjang kegiatan ekonomi daerah, dan salah satu potensi pendapatan daerah. Salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Duri Kecamatan Mandau adalah Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan yang cukup kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan Kota Duri, Kecamatan Mandau.

Perpajakan merupakan masalah yang akan dihadapi pemerintah setiap harinya, Permasalahan ini berawal dari terus bertambahnya jumlah kendaraan setiap hari maupun setiap tahun. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya kebutuhan akan lahan parkir. Apabila ketersediaan kawasan parkir tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada, maka akan muncul kecenderungan bagi pengguna kendaraan untuk memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat.

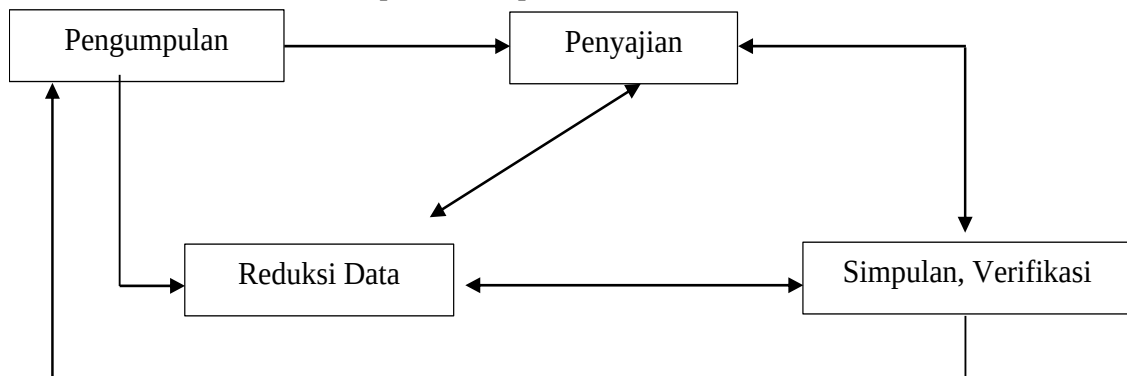
METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang terjadi, khususnya terkait peranan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Jalan Sudirman Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap realitas sosial berdasarkan data yang diperoleh di lapangan (Moleong, 2017). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan data kuantitatif mengenai jumlah kendaraan dan lahan parkir, tetapi juga menelaah makna, persepsi, serta pengalaman para informan yang berhubungan langsung dengan fenomena kemacetan.

Informan penelitian ditentukan dengan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi relevan terhadap permasalahan penelitian (Sugiyono, 2019). Informan penelitian terdiri dari pejabat UPT Parkir Dinas Perhubungan, aparat kepolisian lalu lintas, pelaku usaha di sekitar Jalan Sudirman, serta masyarakat pengguna jalan. Dengan variasi informan tersebut, data yang diperoleh diharapkan dapat mencerminkan berbagai perspektif mengenai peran dan hambatan UPT Parkir.

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1992), yang meliputi tiga tahapan: (1) reduksi data, yaitu menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data sesuai dengan tujuan penelitian; (2) penyajian data, yakni menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu melakukan interpretasi data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Proses analisis dilakukan secara berulang (siklikal) sejak pengumpulan data hingga akhir penelitian, sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat.

Gambar 1 : Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif



Sumber :

Sugyono, 2016

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan UPT Parkir Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau dalam mengatasi kemacetan di Jalan Sudirman Duri dapat dianalisis menggunakan teori Henry Mintzberg yang membagi fungsi organisasi ke dalam tiga aspek, yaitu interpersonal role, informational role, dan decisional role. Adapun data untuk para pengguna lahan parker akan dikenai biaya atau telah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Jenis Kendaraan Sekali Parkir	Tarif
Sepeda Motor	Rp.1000,-
Mobil Penumpang Roda Empat	Rp.2.000,-
Mobil Penumpang Roda Enam	Rp.3.000,-
Mobil Barang Roda Empat	Rp.3.000,-
Mobil Barang Roda Enam	Rp.3.000,-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha mendefinisikan parkir sebagai kondisi ketika suatu kendaraan berada dalam keadaan tidak bergerak atau berhenti untuk sementara waktu.

Selanjutnya, Pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan pada lokasi parkir khusus yang telah disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Desa.

1. Interpersonal Role

Peran interpersonal menekankan fungsi organisasi dalam membangun hubungan sosial, kepemimpinan, serta menjadi representasi pemerintah daerah di mata masyarakat.

Kepala UPT Parkir Kecamatan Mandau menyatakan bahwa petugas resmi telah ditempatkan di beberapa titik sepanjang Jalan Sudirman untuk membantu kelancaran lalu lintas dan menarik retribusi parkir. Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Petugas lapangan mengakui bahwa masih banyak juru parkir liar yang memungut biaya dari masyarakat tanpa menggunakan atribut resmi dan tanpa menyetorkan hasil pungutan kepada pemerintah daerah. Keberadaan juru parkir liar ini tidak hanya merugikan masyarakat yang dipungut biaya di luar ketentuan, tetapi juga merugikan pemerintah daerah karena pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir tidak diterima secara utuh.

Masyarakat pengguna jalan juga mengeluhkan kondisi ini. Mereka menilai bahwa keberadaan petugas parkir resmi kurang memberikan kepastian di lapangan karena sering kali keberadaannya tumpang tindih dengan juru parkir liar. Situasi ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja UPT Parkir menurun. Menurut Mintzberg (1973), interpersonal role mencakup fungsi representasi dan kepemimpinan yang menuntut organisasi tampil sebagai aktor terpercaya dalam memberikan pelayanan publik. Namun dalam konteks Jalan Sudirman Duri, UPT Parkir belum berhasil menampilkan peran representatif yang kuat. Lemahnya pengawasan dan absennya tindakan tegas terhadap juru parkir liar membuat fungsi interpersonal role ini tidak berjalan maksimal.

2. Informational Role

Peran informasi menekankan kewajiban organisasi untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyebarkan informasi yang relevan kepada masyarakat maupun pihak internal. Kepala UPT Parkir menegaskan bahwa pihaknya secara rutin membuat laporan penerimaan retribusi parkir, yang menjadi dasar evaluasi kinerja internal. Akan tetapi, informasi yang disusun lebih banyak bersifat administratif dan tidak disampaikan kepada masyarakat secara luas. Hal ini membuat masyarakat tidak mengetahui secara pasti berapa besaran tarif parkir resmi, lokasi parkir legal, serta sanksi yang berlaku bila melakukan pelanggaran.

Pelaku usaha di sekitar Jalan Sudirman menambahkan bahwa sosialisasi tentang lokasi parkir resmi hampir tidak pernah dilakukan. Akibatnya, banyak pengendara yang memarkirkan kendaraan sembarangan, termasuk di badan jalan yang menghambat arus lalu lintas. Pandangan serupa disampaikan oleh masyarakat pengguna jalan yang menilai kurangnya informasi membuat mereka mengandalkan kebiasaan dalam memarkir kendaraan, bukan pada aturan resmi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa informational role UPT Parkir belum berjalan sesuai harapan. Padahal, Mintzberg menekankan bahwa penyebaran informasi merupakan fungsi vital dalam peran manajerial agar kebijakan organisasi dapat dipahami dan diterima secara menyeluruh. Kurangnya sosialisasi menimbulkan kesenjangan antara aturan tertulis dan praktik di lapangan, yang pada akhirnya memperparah permasalahan kemacetan.

Selain itu, minimnya informasi juga berdampak pada ketidakpastian hukum. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui perbedaan antara juru parkir resmi dan juru parkir liar. Akibatnya, praktik parkir liar seolah dianggap sebagai hal yang lumrah. Dengan demikian, UPT Parkir seharusnya lebih aktif menyampaikan informasi melalui papan pengumuman, spanduk, media sosial, maupun kerja sama dengan aparat kepolisian agar masyarakat dapat memahami aturan parkir dengan baik.

3. Decisional Role

Peran pengambilan keputusan berhubungan dengan kewenangan organisasi dalam menetapkan kebijakan teknis, mengalokasikan sumber daya, serta memecahkan masalah secara strategis. Kepala UPT Parkir menyampaikan bahwa pihaknya telah

melakukan penataan titik parkir resmi dan penertiban kendaraan yang parkir sembarangan. Namun, upaya tersebut dinilai belum efektif. Aparat Satlantas Polsek Mandau menilai bahwa pelaksanaan kebijakan teknis masih terkendala keterbatasan jumlah personel dan sarana prasarana yang mendukung. Akibatnya, razia penertiban tidak dilakukan secara konsisten dan praktik parkir liar tetap berlangsung.

Masyarakat menambahkan bahwa pada jam-jam sibuk, terutama di sekitar Jembatan Mandau, kendaraan yang parkir sembarangan menjadi salah satu penyebab utama kemacetan. Ketidakmampuan UPT Parkir dalam mengendalikan situasi ini menunjukkan bahwa decisional role belum dijalankan dengan baik. Selain itu, keputusan strategis yang bersifat jangka panjang, seperti penyediaan lahan parkir khusus atau penerapan sistem parkir berbasis elektronik (e-parking), hingga kini belum terealisasi. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang diambil masih bersifat reaktif dan tidak mampu mengatasi akar permasalahan kemacetan.

Menurut Mintzberg, decisional role menuntut kemampuan organisasi untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengalokasikan sumber daya serta merumuskan solusi strategis. Namun dalam konteks ini, keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi dengan instansi lain, serta lemahnya komitmen penegakan hukum membuat UPT Parkir belum mampu menampilkan peran pengambil keputusan yang efektif. Keputusan yang ada masih bersifat administratif, belum menyentuh level inovasi yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi pengurangan kemacetan.

Dari ketiga aspek yang dikemukakan Mintzberg, dapat disimpulkan bahwa peranan UPT Parkir Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau dalam mengatasi kemacetan Jalan Sudirman masih belum optimal. Pada aspek interpersonal role, lemahnya pengawasan terhadap juru parkir liar menyebabkan citra pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik menjadi negatif. Pada aspek informational role, kurangnya sosialisasi aturan parkir mengakibatkan masyarakat tidak memahami perbedaan antara parkir resmi dan liar, sehingga praktik pelanggaran parkir tetap terjadi. Sementara pada aspek decisional role, keterbatasan sumber daya dan belum adanya kebijakan strategis membuat UPT Parkir gagal memberikan solusi jangka panjang dalam pengendalian kemacetan.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto (2015) bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh sejauh mana aktor dapat memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan peran UPT Parkir perlu difokuskan pada tiga hal utama: peningkatan pengawasan untuk mempertegas representasi pemerintah, penyebaran informasi secara luas dan berkelanjutan, serta pengambilan keputusan strategis yang inovatif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau dalam mengatasi kemacetan di Jalan Sudirman Duri, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran organisasi belum berjalan secara optimal. Pada aspek interpersonal role, UPT Parkir belum mampu menjalankan fungsi representasi pemerintah daerah secara efektif karena masih maraknya juru parkir liar yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pada aspek informational role, kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait aturan serta lokasi parkir resmi masih sangat terbatas, sehingga masyarakat kurang memahami ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada aspek decisional role, kebijakan teknis yang diambil belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan parkir, dan keputusan strategis seperti pembangunan lahan parkir baru atau penerapan sistem parkir modern belum terealisasi akibat keterbatasan sumber daya.

Secara keseluruhan, ketiga peran menurut Mintzberg interpersonal, informational, dan decisional menunjukkan bahwa kinerja UPT Parkir dalam mengurangi kemacetan Jalan

Sudirman masih belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap juru parkir liar, penguatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, serta pengambilan keputusan strategis yang inovatif agar UPT Parkir dapat berfungsi lebih optimal dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan mengurangi kemacetan di kawasan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu. Kybernology (Jilid 1). Jakarta: Rineka Cipta. 2011. Hlm: 7 Ndraha, T. (1997). Dimensi-dimensi pemerintahan desa. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2009). Peranan sosiologi: Suatu pengantar, edisi baru. Jakarta: Penerbit
- Sugiyono. (2005). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suyatno. (2005). Metode penelitian sosial: Berbagai alternatif pendekatan (Edisi Revisi). Kencana.
- Syafie, A. (2020). Ilmu administrasi publik. Rineka Cipta. Hlm: 7
- Abutyn, S. (2025). Theorizing Affective Motivation: Motives, Seeking, and the Mundanity of Pleasure. *Sociological Theory*, 43(2), 91–114.
- Cheong, A. R. (2023). Theorizing Omission: State Strategies for Withholding Official Recognition of Personhood. *Sociological Theory*, 41(4), 377–402.
- Investments, C., & Quelch, J. (2025). Effects of Institutional Business Power : (2025). Threats to Democracy: A Danger to Social Justice for All. 3(2), 309–319.
- Krause, M. (2021). On Sociological Reflexivity. *Sociological Theory*, 39(1), 3–18.
- McCurry MK. (2013). An exploratory study of. *Journal of Neuroscience Nursing*, 45(1), 52–60.
- Meghji, A. (2024). From Public Sociology to Sociological Publics: The Importance of Reverse Tutelage to Social Theory. *Sociological Theory*, 42(2), 114–136.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2012 Pasal 18 yang berisi tentang penertiban usaha parkir yang dilakukan wajib pajak tidak melakukan kewajibannya